

REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia, selanjutnya disebut "Para Pihak";

MENIMBANG hubungan bilateral antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dengan memfasilitasi perjalanan pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari kedua negara;

SESUAI dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut;

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga Negara Indonesia, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang masih berlaku dan tidak terakreditasi di wilayah Pihak lain, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, tinggal di dan pergi dari wilayah Republik Italia untuk jangka waktu tidak lebih dari sembilan

puluh (90) hari (dalam satu atau beberapa periode) dalam jangka waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal masuk ke wilayah Schengen.

2. Warga Negara Republik Italia, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang masih berlaku dan tidak terakreditasi di wilayah Pihak lain, tidak diwajibkan untuk memperoleh visa untuk masuk, transit, tinggal di dan pergi dari wilayah Republik Indonesia untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal masuk.

PASAL 2
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN POS KONSULER

1. Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan anggota misi diplomatik atau pos konsuler serta perwakilan untuk organisasi internasional, yang berada diwilayah Pihak lain, beserta anggota keluarga mereka yang merupakan pemegang paspor yang masih berlaku sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, wajib memperoleh visa yang sesuai sebelum memasuki wilayah negara Pihak lain tersebut.

2. Warga negara sebagaimana disebutkan di atas, setelah diakreditasi, dapat masuk, transit melalui, tinggal di dan meninggalkan wilayah Pihak lain tanpa visa selama periode tugas mereka.

PASAL 3
KETENTUAN MASUK DAN KELUAR

1. Warga Negara dari masing-masing pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang masih berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 dari Persetujuan ini, dapat memasuki dan meninggalkan wilayah Pihak lainnya, pada setiap titik lintas batas yang terbuka untuk lalu lintas internasional.

PASAL 4
HAK PEJABAT BERWENANG

1. Persetujuan ini tidak membebaskan warga negara dari salah satu Pihak, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, dari kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah negara Pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai masuk, tinggal dan keluar warga negara asing termasuk masa berlaku paspor.

2. Persetujuan ini tidak membatasi hak pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak untuk menolak masuk atau memperpendek masa tinggal dari warga negara dari Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, yang dinyatakan tidak dikehendaki.

PASAL 5
PENANGGUHAN

1. Salah satu Pihak berhak menunda sementara pelaksanaan Persetujuan ini secara sebagian maupun keseluruhan, untuk alasan-alasan keamanan nasional, kesehatan masyarakat atau ketertiban umum.

2. Penerapan serta penghentian dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus segera diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya tindakan tersebut.

3. Penangguhan dari pelaksanaan Persetujuan ini tidak berpengaruh pada hak warga negara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan 2 dari Persetujuan ini, yang telah berada di dalam wilayah negara penerima.

PASAL 6
CONTOH DAN PENERBITAN PASPOR ATAU DOKUMEN PERJALANAN

1. Para Pihak wajib saling bertukar contoh-contoh paspor diplomatik dan paspor dinasnya, melalui saluran diplomatik, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya Persetujuan ini.

2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan paspor dinas baru, atau modifikasi terhadap paspor yang masih berlaku, Para Pihak, melalui saluran diplomatik, wajib saling memberikan contoh dari paspor tersebut, tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.

3. Apabila warga negara dari salah satu Pihak kehilangan atau rusak paspor diplomatik dan dinasnya di wilayah Pihak lain, mereka wajib segera memberitahukan kepada pejabat berwenang di negara penerima melalui misi diplomatik atau pos konsuler negara asal mereka. Misi diplomatik atau pos konsuler yang bersangkutan, sesuai dengan hukum dan peraturan di negaranya, wajib menerbitkan kepada warga negara tersebut paspor baru atau dokumen perjalanan untuk kembali ke negara asal.

PASAL 7
PERUBAHAN

1. Persetujuan ini dapat diubah dengan adanya kesepakatan bersama dari para Pihak melalui protokol tambahan atau pertukaran nota diplomatik, yang wajib dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini.

2. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 10, ayat 1 dari Persetujuan ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran ketentuan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau perundingan antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
KOMPATIBILITAS INTERNASIONAL

Persetujuan Ini wajib tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban yang dihasilkan oleh perjanjian internasional, termasuk perjajian regional, dimana Republik Italia dan Republik Indonesia merupakan pihak didalamnya.

PASAL 10
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir, melalui saluran diplomatik, dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa semua persyaratan untuk berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana ditetapkan dalam prosedur hukum internal masing-masing negara, telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan wajib diakhiri tiga (3) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran dari Pihak lainnya.

DIBUAT di Jakarta pada 9 November 2015, dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Italia, Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH	**UNTUK PEMERINTAH**
REPUBLIK INDONESIA	**REPUBLIK ITALIA**
RETNO L.P. MARSUDI	**FEDERICA GUIDI**
MENTERI LUAR NEGERI	**MENTERI PEMBANGUNAN**
REPUBLIK INDONESIA	**EKONOMI REPUBLIK ITALIA**

REPUBLIK INDONESIA

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
IN MATERIA DI ESENZIONE DAL VISTO PER I POSSESSORI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO E DI SERVIZIO

Il Governo della Repubblica di Indonesia ed il Governo della Repubblica Italiana di seguito denominate "le Parti",

CONSIDERANDO le relazioni amichevoli tra le Parti,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente le relazioni amichevoli, agevolando i viaggi per i possessori di passaporto diplomatico e di servizio di entrambi i Paesi,

IN CONFORMITA' alle normative dei rispettivi Paesi,

Hanno raggiunto il seguente accordo:

ARTICOLO 1
ESENZIONE VISTO

1. I cittadini della Repubblica di Indonesia, possessori di un passaporto diplomatico o di servizio in corso di validita' e non accreditati nel territorio dell'altra Parte, sono esentati dalla richiesta di Visto per entrare, transitare e soggiornare nell'altro Paese per una permanenza massima di novanta (90) giorni (continuativi o non) da effettuare entro un periodo di centottanta (180) dalla data di entrata nell'Area Schengen.

2. I cittadini della Repubblica Italiana, possessori di un passaporto diplomatico o di servizio in corso di validita' e non accreditati nel territorio dell'altra Parte, sono esentati dalla richiesta di Visto per entrare, transitare e soggiornare nell'altro Paese per un periodo massimo di trenta (30) giorni dalla data di ogni singolo ingresso;

ARTICOLO 2
VISTI PER MEMBRI DELLA MISSIONE DIPLOMATICA E CONSOLARE

1. I cittadini di ciascuna delle Parti, facenti parte la missione diplomatica o consolare/membri del corpo diplomatico o consolare, cosi' come rappresentanti di Organismi Internazionali, situati nel territorio dell'altra Parte, e loro familiari possessori di passaporti in corso di validita' in base all'Art.1, dovranno richiedere il necessario Visto prima di entrare nel territorio.

2. I summenzionati cittadini, dopo l'accreditamento, potranno entrare, transitare, soggiornare e lasciare il territorio dell'altra parte senza richiedere il Visto durante il periodo dell'incarico.

ARTICOLO 3
CONDIZIONI DI ENTRATA E DI USCITA

I cittadini delle Parti, possessori di passaporto diplomatico o di servizio citati negli Art. 1. e 2. del presente Accordo, potranno entrare o lasciare il territorio dell'altra Parte attraverso tutte le possibili frontiere aperte al traffico internazionale di passeggeri.

ARTICOLO 4
DIRITTI DI AUTORITA'

1. Il presente Accordo non esime i cittadini di ciascuna Parte, possessori di passaporto diplomatico o di servizio, dall'obbligo di rispettare la normativa vigente nello Stato ricevente, inclusa, ma non limitata, alla normativa riguardante l'entrata, il soggiorno e l'uscita di cittadini stranieri e la validita' del passaporto.

2. Il presente Accordo non interferisce con il diritto delle competenti autorita' di ciascuna Parte di rifiutare l'ammissione o di ridurre la permanenza nel rispettivo territorio di cittadini dell'altra Parte, menzionati negli Art. 1. e 2., che sono considerati indesiderabili.

ARTICOLO 5
SOSPENSIONE

1. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere il presente Accordo, interamente o in parte, per ragioni di sicurezza nazionale, salute pubblica e ordine pubblico.

2. L'introduzione cosi' come la conclusione delle misure cui si riferisce il Paragrafo 1. Di questo Articolo saranno immediatamente notificate all'altra parte attraverso i canali diplomatici, non più tardi di trenta (30) giorni prima dell'entrata in vigore di tali misure;

3. La sospensione dell'attuazione del presente Accordo non riguardera' i diritti dei cittadini citati negli Articoli 1. e 2. del presente Accordo gia' residenti nel territorio dello stato ospitante.

ARTICOLO 6
SPECIMEN ED EMISSIONE DI PASSAPORTI O DOCUMENTI DI VIAGGIO

1. Le Parti si scambieranno specimen dei passaporti diplomatici e di servizio attraverso i canali diplomatici non piu' tardi di trenta (30) giorni prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Nel caso venga introdotto un nuovo passaporto diplomatico o di servizio o in caso di modifiche a quelli esistenti, le Parti comunicheranno rispettivamente attraverso i canali diplomatici gli specimen di tali passaporti non piu' tardi di trenta (30) giorni prima della data in cui tali nuovi passaporti o modifiche entreranno in vigore.

3. Nel caso in cui i cittadini di ciascuna parte smarriscano o danneggino il loro passaporto diplomatico o di servizio nel territorio del Paese dell'altra parte, dovranno informare immediatamente le competenti autorita' del Paese ricevente attraverso i canali diplomatici o gli uffici consolari del proprio Paese. La Rappresentanza diplomatica o consolare interessata dovra' quindi emettere per i predetti un documento di rimpatrio in conformemente alla propria legislazione.

ARTICOLO 7
RETTIFICHE

1. Il presente Accordo puo' essere modificato di comune accordo tra le Parti attraverso Protocolli aggiuntivi o scambio di Note Verbali, che saranno considerate come parti integranti del presente Accordo.

2. Tali modifiche o revisioni entreranno in vigore in base alle disposizioni del paragrafo 1. dell'Articolo 10. del presente Accordo.

ARTICOLO 8
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi differenza o controversia derivante dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sara' risolta in modo amichevole attraverso la consultazione o il negoziato tra le Parti tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 9
COMPATIBILITA' INTERNAZIONALE

Il presente Accordo non viola i diritti e gli obblighi derivanti da accordi internazionali –inclusi quelli regionali– di cui la Repubblica Italiana o la Repubblica di Indonesia fanno parte.

ARTICLE 10
ENTRATA IN VIGORE, DURATA E CONCLUSIONE

1. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dalla data di ricezione, attraverso i canali diplomatici, dell'ultima notifica scritta con cui le Parti comunicheranno formalmente la conclusione delle procedure interne di ratifica.

2. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo indefinito e si concludera' tre (3) mesi dopo la data di ricezione della notifica di conclusione dell'altra Parte.

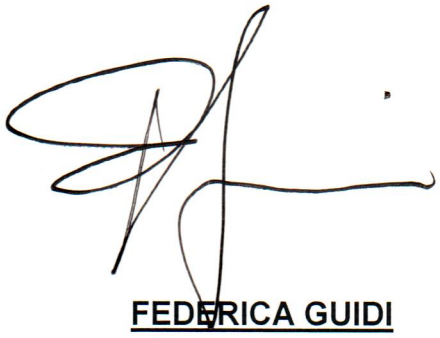
FIRMATO a Jakarta, Indonesia, il 9 novembre 2015 in due copie originali in Indonesiano in Italiano, e in Inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di discrepanza tra le interpretazioni prevarra' il testo lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTRO DEGLI ESTERI DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA



FEDERICA GUIDI
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
ON
THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic, hereinafter referred to as "the Parties",

CONSIDERING the friendly relations between the Parties;

DESIRING to further strengthen their friendly relations by facilitating the travels of holders of diplomatic and service passports of both countries;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

have agreed as follows:

Article 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic and service passport and not accredited in the territory of the other Party, shall not be required to obtain a visa to enter, transit, stay in and leave the territory of the other Party for a period of stay not exceeding ninety (90) days

(in one or several periods) within one hundred and eighty days (180), since the date of entry in the Schengen Area.

2. Nationals of the Italian Republic, holders of valid diplomatic and service passport and not accredited in the territory of the other Party, shall not be required to obtain a visa to enter, transit, stay in and leave the territory of the other Party for a period not exceeding thirty (30) days from the date of each entry.

Article 2

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR MISSION

1. Nationals of either Party who are members of diplomatic missions, consular posts as well as representatives of International Organizations, located in the territory of the other Party, and their family members holding valid passports mentioned in Article 1, shall be requested to obtain the appropriate entry visa prior to their entry.

2. The above mentioned persons, after the accreditation, may enter, transit through, stay in and leave the territory of the other Party without visa during the period of their assignment.

Article 3

ENTRY AND EXIT CONDITIONS

Nationals of the Parties, holders of diplomatic and service passports mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, may enter or leave the territory of the other Party at all border crossing points opened to international passengers' traffic.

Article 4
RIGHTS OF AUTHORITIES

1. This Agreement shall not exempt nationals of either Parties holders of diplomatic and service passports from the obligation to respect the legislations and regulations of the receiving State, including but not limited to the laws and regulations concerning the entry, stay, and exit of foreigners as well as passport validity.

2. This Agreement does not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse admission or shorten the stay in its territory of nationals of the other Party, specified in Article 1 and 2, who are considered undesirable.

Article 5
SUSPENSION

1. Either Party reserves the right to suspend this Agreement, either in whole or in part, for reasons of national security, public health and public order.

2. The introduction as well as the termination of the measure referred to in Paragraph 1 of this Article shall be immediately notified to the other Party through diplomatic channels, no later than thirty (30) days before the entry into force of such measure.

3. The suspension of the implementation of this Agreement shall not affect the rights of nationals, mentioned in Articles 1 and 2 of this Agreement, who already stay in the territory of the host State.

Article 6

SPECIMEN AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR TRAVEL DOCUMENTS

1. The Parties shall exchange specimens of the diplomatic and service passports through diplomatic channels not later than thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.

2. In case of introduction of new diplomatic and service passports as well as modification of the existing ones, the Parties shall convey to each other, through diplomatic channels, specimens of these passports, no later than thirty (30) days before the date the new passports or modifications enter into force.

3. In case nationals of either Party lose or damage their diplomatic and service passports in the territory of the country of the other Party, they shall immediately inform the competent authorities of the receiving country through diplomatic mission or consular office of the country of their nationality. The diplomatic mission or consular office concerned shall issue to the aforementioned persons a document for returning to the country of their nationality, in conformity with the legislation of their country.

Article 7

AMENDMENTS

1. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by additional Protocols or exchanges of Diplomatic Notes, which are to be considered as integral parts of this Agreement.

2. Such amendment or revision shall enter into force according to the provision of Paragraph 1 of the Article 10 of this Agreement.

Article 8
DISPUTES SETTLEMENT

Any difference or disputes arising from the interpretation of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties through diplomatic channels.

Article 9
INTERNATIONAL COMPATIBILITY

This Agreement does not infringe upon the rights and obligations resulting from the international agreements, including any regional agreement, to which the Italian Republic and the Republic of Indonesia are parties.

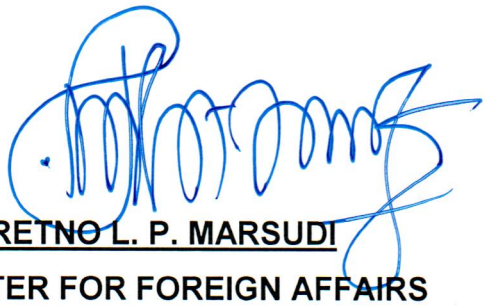
Article 10
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, by which the Parties shall formally communicate each other that their respective internal ratification procedures have been completed.

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period, and shall be terminated three (3) months after the date of the receipt of the notice of termination of the other Party.

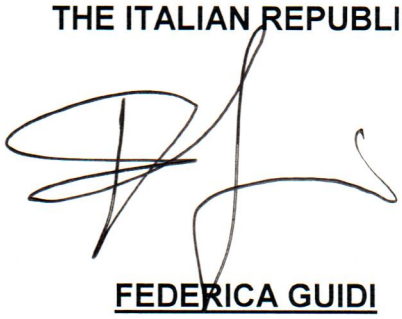
Done at Jakarta on 9 November 2015, in two originals, each in the Indonesian, Italian, and English languages, both being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA



RETNO L. P. MARSUDI
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC



FEDERICA GUIDI
MINISTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC